



**ANALISIS PENGARUH FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN  
STABILISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PDRB  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
1994 – 2004**

*Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin  
Makassar*

**OLEH**  
**AMIRUDDIN**  
**A 111 03 018**

UPTP SEBUKAWAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	23-2-2007
Jenis Dari	Fals. Ekonomi
Luas/Volume	1(satu) lgs
Marga	H
No. Inventaris	208/23-27
No. Klas	SKR-E07

AMi  
a

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PENGARUH FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PDRB PROPINSI SULAWESI SELATAN 1994 – 2004



*Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebahagian  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin  
Makassar*

**OLEH**

**AMIRUDDIN  
A 111 03 018**

**Mengetahui :**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Drs. Hidayat Efy, M. Si.**  
NIP : 131 570 860

**Pembimbing II**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop on the left side and a horizontal line extending to the right.

**Drs. Anas Iswanto Anwar, MA.**  
NIP : 131 902 631



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Ta'ala, Rabb sekalian alam, salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabiullah Muhammad Salallahu Alahi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat-Nya. Karena atas limpahan taufik, kesehatan, rahmat, dan ijin-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Pengaruh Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Anggaran Pembangunan Terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan 1994 -2004"**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata I, pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNHAS.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, telah melibatkan berbagai pihak. Baik itu dalam bentuk bantuan langsung berupa moril dan materi, maupun sumbangan pemikiran, saran, dan petunjuk, yang tak lain adalah demi upaya kesempurnaan penulisan ini.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS dan Bapak **Drs. Muh. Toaha, MBA** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi UNHAS.
2. Ibu **Dr. Hj. Rahmatia, MA**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bapak **Hamrullah, SE., M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNHAS.

3. Bapak **Drs. Hidayat Ely, M.Si** selaku **Pembimbing I** dan Bapak **Drs. Anas Iswanto Anwar, MA** selaku **Pembimbing II**, yang telah banyak memberikan saran, bimbingan, dan arahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Drs. Nuhun Ahmad, MS**, selaku Penasehat Akademik.
5. Terkhusus sembah sujud dan permohonan maaf Anakda kepada Ayahanda **Massaguni** dan Ibunda **Tuwo**, semoga Allah Ta'ala membalas kelak dengan surganya. Ucapan terima kasih Adinda terkhusus pula kepada Kakanda **Burhan M** dan **Masnita M** serta Adik **Mahwan M** dan **Nurhalipah M** dan yang tak terlupakan kakakku yang jauh diseberang sana Kakanda **dr. Veronica**.
6. Pimpinan dan Staff **Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sulawesi Selatan**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data.
7. Pimpinan dan Staff **Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Selatan**, yang telah meberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi UNHAS yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada penulis, selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
9. Seluruh staff pegawai administrasi Fakultas Ekonomi UNHAS yang telah banyak membantu penulis, baik selama proses menjalani perkuliahan maupun ketika perampungan penulisan skripsi ini. Khususnya **Pa' Adi, Pa' Jamal, dan Pa' Parman**.

10. *Special thank's to someone who always disturb mine and the writer feeling, I hope you understand and feel what I do now.*

Dan seluruh pihak, sahabat, kerabat, dan keluarga yang telah banyak membantu penulis mulai dari ketika baru memasuki dunia kampus hingga perampungan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan. Sehingga penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya, atas bantuan yang telah diberikan, Amin.

**Makassar, 14 Februari 2007**

**Penulis**

**Amiruddin**

*Melalui ruang terbatas ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk :*

Keluarga besar SOLID '03 yang telah sudi berbagi suka duka selama ini,  
Bidadari2nya : Ulfa (kartu Q nya SOLID), Riri, Emi, Okta (kapan kalian  
nyusul ces), Ellink, Ratna, Asti, Ade, Tri, Chichi, Chery, Dewi, Wira, Sari,  
Dian, Jumi, Yuli, Sabrina, Ina (cepat-cepat maki semua selesai).  
Pangeran2nya : Code (kartu K nya SOLID), Amir Hamzah, Halim (udah  
beres ga' skripsinya) Cappo, Ateng, Ilo, Daud, Imanuel, Noge, Alex,  
Anda, Nuzul, Yona, Amir Ballak, Ivan, Ikram,  
Wahyu (bosnya HMI fekon) & Nanang. Serta adik2 IE angkatan '04, '05 &  
'06 yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Terkhusus selalu buat Yahya, Abdullah (sang pegawai) & Rasyid  
(ingat ki' selalu kenangan ta' di mushallah sastra)  
"Sory friend Aq duluan, tapi Aq yakin kalian juga bisa nyusul segera"

Teman2 KKN-ku di KBI Makassar: K' Jamal, K' Dila (thank's kanda atas  
smsnya), Ade, Septi, Ardin, Rara, Opick, Teguh & Eka  
(always remember our experience there)

Kanda Bahrul '01 yang selalu terganggu tidur malamnya (thank's yach  
atas tumpangannya), seluruh keluarga besar Pondok Alif, Pondok As-  
Sunnah, Pondok Al-Qurabha serta Pondok Ba (Datsir, Haeril & Suradi)

Kanda2 SP '02 : K' Sinta, Kiki, Salma, Lina, Cindy, etc  
(thank's atas celotehnya selama ini),  
terkhusus buat K' Uni (aq yakin kanda, kita bisa)

Kanda2 seperjuanganku wisuda bulan 3 : K' Adam '99, Hadiyanto '01,  
Yayang, Yohanis, Aya, Vera, Gito, Firlita, Uji '01, Abot, Hj. Riri, Juanita '01,  
Idawati, Mutmainnah '00, Daniel, Herlin, Kaisar, Aiyub '01, Risnal &  
Muslimin '00 (SE, semua maki)

Untuk sahabat karibku di Vhalovho City, Dedy Gitu Lhooo, Asruddin  
(sang perantau), David, Mamat, Ridho, Hajir & Umning (thank's  
bantuannya cess) serta teman2ku di REMAS Al-Huda,  
dan yang hampir terlupakan Viny dan Ani.

*"A friend in need is a friend deed : Teman yang terbaik adalah  
teman diwaktu susah maupun senang"*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Kupersembahkan :**

Skripsi ini sebagai hadiah khusus ungkapan kasih sayang dan terima kasih anakda untuk kedua orang tuaku tercinta, yang telah merawat dan membesarkan dan menyekolahkan anakda hingga ke perguruan tinggi melalui hasil keringat dan jerih payahnya serta doa dan wejangan-wejangannya, Insya Allah anakda akan ingat selalu.

Ayah yang selalu tegas dan bijaksana dalam membimbing anak2nya, Ayah yang tak kenal lelah dan letih dalam mencari nafkah. Anakda bangga menjadi anakmu, semoga suatu hari nanti anakda dapat berbakti dan membahagiakanmu

(Terkhusus doa anakda selalu untuk ayahanda tercinta, Massaguni)

Ibu yang selalu merawatku ketika kecil, mendekapku ketika kedinginan serta melindungiku dari teriknya matahari. Ibu yang selalu memberikan wejangan kepada anak2nya, Ibu yang selalu membimbing dan mengarahkan anak2nya dalam menggapai cita-cita. Maafkan anakda bila pernah berbuat salah dan melukai hatimu, anakda sadar bahwa sesungguhnya, sorga-Nya ada dibawah telapak kakimu

(Sembah sujud dan doa anakda selalu untuk Ibunda, Tuwo)

Kakak2ku yang tercinta dan tersayang, Kakanda Burhan M dan Masnita M yang telah memberikan dorongan, spirit, maupun bimbingan kepada adik2nya dan paling utama thank's yach atas kirimannya selama ini.

Adikmu Insya Allah suatu saat akan membalasnya  
Adik2ku yang tercinta, Mahwan M dan Nurhalipah M, Kakak bangga punya adik seperti kalian, pesan kakak kalian belajar dengan giat dan tetap akur yah.

Satu kalimat pesan dari Bapak dan Ibu, yang Insya Allah kami anak2mu tidak akan pernah lupa :

**“Masiang Duang Bonggi Ali Berhasil, Dau Lalo Ali  
Sitiro-Tiroi”**

*Makassar, 14 Februari 2007*

## DAFTAR ISI

<i>Halaman Judul</i> .....	i
<i>Halaman Pengesahan</i> .....	ii
<i>Kata Pengantar</i> .....	iii
<i>Daftar Isi</i> .....	vi
<i>Daftar Tabel</i> .....	viii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	7
2.1. Keuangan Negara Secara Teoritis .....	7
2.2. Anggaran Pembangunan Daerah .....	13
2.3. Perekonomian, Anggaran dan Peran Pemerintah.....	25
2.4. Kerangka Fikir Penelitian dan Hipotesis .....	35
<b>Bab III Metodologi Penelitian</b> .....	39
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	39
3.3. Sumber dan Cara Pengumpulan Data .....	39
3.4. Metode Analisis .....	40
3.5. Batasan Operasional Variabel .....	42
3.6. Sistematika Bahasan .....	43
<b>Bab IV Sekilas Tentang Propinsi Sulawesi Selatan</b> .....	47
4.1. Letak Geografis .....	47
4.2. Demografi .....	49
4.3. Kinerja Ekonomi .....	52
<b>Bab V Pembahasan</b> .....	58



5.1. Anggaran Belanja Pembangunan dan Realisasinya .....	58
5.2. Profil Produk Domestik Regional Bruto .....	61
5.3. Hasil Perhitungan Pengaruh Fungsi Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan .....	66
5.4. Analisis Hasil Perhitungan .....	70
<b>Bab VI Penutup</b> .....	72
6.1. Kesimpulan .....	72
6.2. Saran .....	72
<i>Daftar Pustaka</i> .....	74
<i>Lampiran</i> .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pengelompokan Sektor Pembangunan Menurut Fungsi Anggaran .....	46
Tabel 4.1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan 2004 .....	48
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan .....	50
Tabel 4.3. Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Di Propinsi Sulawesi Selatan .....	51
Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2004 .....	53
Tabel 4.5. Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004 .....	56
Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Fungsi Anggaran Tahun 1994-2004 .....	59
Tabel 5.2. Perkembangan PDRB Tahun 1994-2004 Atas Harga Konstan 1993 .....	62
Tabel 5.3. Hasil Regresi Anggaran Pembangunan Fungsi Alokasi (Al), Distribusi (Ds) dan Stabilisasi (St) Terhadap PDRB (Yp) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1994 – 2004 .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1. Latar Belakang

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan peranan sektor publik, menjadi suatu analisis yang penting dan menarik untuk dikaji saat ini. Sebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang, telah melahirkan krisis multidimensi, dan hal ini telah memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian Indonesia diberbagai sektor. Dampak itu antara lain penurunan daya beli masyarakat (*purchasing power*), lesunya investasi dunia usaha, dan lainnya, sehingga terjadi penurunan kinerja perekonomian Indonesia secara makro maupun mikro. Hal ini juga berdampak pada penurunan pembiayaan pembangunan, baik pembangunan nasional yang dibiayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), maupun yang dibiayai dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Peranan anggaran belanja pembangunan sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan suatu instrumen yang memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi pemerintah daerah, baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan bagian dari sistem kebijakan daerah, yang berperan dalam menterjemahkan secara operasional keputusan politik dan rencana strategis (Renstra) pembangunan nasional. Terjemahan itu selanjutnya dijabarkan oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia, melalui pola dasar pembangunan daerah (Poldas) dan lainnya (Renstra, RPJM, RPJP).

Secara umum peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human investment* dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktivitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya.

Dalam konteks ini, aktivitas pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yang dihasilkan. Walau terdapat beberapa cara penting yang dapat dilakukan, agar alokasi anggaran pemerintah dapat mendorong dan meningkatkan total output (PDRB) itu, seperti melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik, layanan publik, dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor, dan sebagainya.

Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat, pada dasarnya dapat dilakukan dengan memberdayakan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut, dengan senantiasa memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang desentralisasi, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keterlibatan semua pihak memberi harapan, kiranya hasil kebijakan itu dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sekaligus dengannya diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah diketahui memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di suatu daerah, karena melalui instrumen pengeluaran, pemerintah dapat berperan menjamin suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian anggaran yang terbatas. Keputusan itu tentu telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan efek yang akan ditimbulkannya, terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Anggaran belanja pembangunan disusun dalam kerangka pelaksanaan prinsip anggaran berimbang yang dinamis disatu sisi dan memiliki fungsi stabilisator disisi lain, yang diharapkan mampu menjadi sumber pengaman dalam upaya menjaga keserasian antara pengeluaran dan penerimaan daerah. Keberimbangan yang dinamis dari fungsi stabilisator itu, diharapkan dapat memantapkan stabilitas pembangunan ekonomi sekaligus menjamin berlangsungnya pembangunan daerah yang berkesinambungan ke masa depan.

Sebagai akselerator pembangunan, strategi kebijakan alokasi anggaran belanja pembangunan selalu diarahkan untuk makin menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara lebih adil, merata, serta meluas. Hal itu bertujuan mencegah pelebaran kesenjangan (*gap*) tingkat pendapatan, baik antar daerah, individu, maupun antar sektor. Upaya pencapaian pemerataan pembangunan antar sektor dapat dilaksanakan, antara lain melalui peningkatan keterkaitan dan keterpaduan alokasi pembiayaan proyek-proyek pembangunan antar sektor ekonomi. Keterkaitan dan keterpaduan terutama antara sektor industri dan jasa, mampu menopang sektor pertanian sebagai sektor basis di propinsi ini (Sulawesi Selatan). Langkah itu diharapkan secara bertahap dapat menciptakan kesinambungan peranan dan kontribusi ketiga sektor ekonomi, dalam pencapaian nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang tinggi,

engan harapan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagai dinamisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan diharapkan mampu menunjang berkembangnya potensi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi di sektor pemerintah, jumlah dan alokasi anggaran pembangunan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan perekonomian daerah. Wujud investasi itu terkait dengan pembangunan kegiatan-kegiatan yang memang tidak dapat dibiayai oleh masyarakat dan dunia usaha, seperti penyediaan prasarana dan sarana dasar yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan daerah. Investasi itupun mencakup pengembangan sumber daya manusia, serta proyek-proyek pembangunan produktif lainnya, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah dimaksud.

Pentingnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk masing-masing sektor, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat, sistematis, serta mempertimbangkan dan memperhatikan dengan baik skala prioritas yang ingin dicapai. Pelaksanaannya pun harus terarah dan terkendali sesuai sasaran sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mencakup perwujudan dari tujuan pembangunan nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan itu adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat daerah tersebut pada khususnya. Hal tersebut yang mendasari pemerintah propinsi Sulawesi Selatan, sehingga senantiasa meningkatkan dan merumuskan program

perencanaan pembangunan daerah, yang mengacu pada rencana strategis pembangunan daerah (Renstrada).

Data BPS dan BAPPEDA Sulawesi Selatan menunjukkan, bahwa realisasi pengeluaran anggaran pembangunan propinsi Sulawesi Selatan menurut sektor mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama periode 1992 - 2002. Hal ini dapat dilihat pada jumlah realisasi anggaran pembangunan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan, adalah sekitar Rp 68,11 Milyar di tahun anggaran 1992/1993 kemudian meningkat menjadi Rp 347,98 Milyar pada tahun 2002.

Uraian data di atas bila di kaitkan dengan PDRB propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan 1993 yang terjadi sebesar Rp 8.088.147,10 (juta rupiah) di tahun 1994, yang mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 12.187.846,64 (juta rupiah) di tahun 2004. Perbandingan kedua data ini menimbulkan suatu *research question* yaitu apakah anggaran pembangunan berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB propinsi Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam penelitian dan pengkajian ini lebih dititik beratkan pada penyusunan APBD, khususnya alokasi anggaran pembangunan menurut sektor dan bidang dalam menopang kebutuhan daerah. Mengingat alokasi per sektor tersebut akan memperlihatkan berapa anggaran pembangunan yang mengarah ke fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi yang kemudian fungsi-fungsi tersebut dikaitkan dengan PDRB propinsi, yang dalam konteks ini adalah propinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu judul penelitian yang diajukan adalah : **“Analisis Pengaruh Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Anggaran Pembangunan Terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan 1994 - 2004”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dibahas dalam studi ini adalah :

1. Bagaimana hubungan dan pengaruh fungsi masing-masing alokasi anggaran terhadap perkembangan ekonomi (PDRB) propinsi Sulawesi Selatan .
2. Fungsi alokasi anggaran yang manakah lebih signifikan peranannya dalam membentuk PDRB propinsi Sulawesi Selatan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh fungsi masing-masing alokasi anggaran terhadap perkembangan PDRB propinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui fungsi anggaran yang paling signifikan dalam membentuk PDRB propinsi Sulawesi Selatan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui pengaruh fungsi masing-masing alokasi anggaran terhadap PDRB propinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan proyeksi pengalokasian anggaran tahunan dan target pertumbuhan ekonomi.
3. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya terutama yang berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Keuangan Negara Secara Teoritis

Defenisi umum dari keuangan negara (*public finance*) adalah ilmu yang membicarakan tentang peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak kebijakan pemerintah dibidang fiskal terhadap perekonomian. Dalam perekonomian moderen saat ini, kita melihat bahwa ada empat kelompok utama dari subjek ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan/swasta, pemerintah/negara dan subjek luar negeri, dimana masing-masing subjek ekonomi ini memiliki kegiatan-kegiatan yang umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan bagi anggota-anggota dari subjek ekonomi tersebut.

Pada dasarnya terdapat perbedaan dalam cara pandang antara subjek ekonomi negara dan subjek ekonomi rumah tangga, walaupun sama-sama memerlukan adanya pengeluaran untuk membiayai kegiatannya dan harus ada penerimaan (sumber dana) guna menunjang pengeluarann tersebut. Bagi subjek ekonomi rumah tangga pada umumnya besarnya pengeluaran tergantung pada besarnya penerimaan (pendapatan) yang ada. Sebaliknya bagi subjek ekonomi pemerintah/negara, bukan penerimaan yang menentukan besarnya pengeluaran tetapi justru pengeluaran negara yang mempengaruhi besarnya penerimaan negara, hal ini terjadi karena harus dapat menjamin kebutuhan minimum warganya.

Perkembangan ekonomi bangsa-bangsa pada abad ke-20 saat ini, ternyata tidak ada lagi yang menganut sistim ekstrim yang murni baik itu yang menganut sistim

kapitalis murni maupun yang menganut sosialis murni. Negara yang semula menganut kapitalis murni mulai memandang perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian, sedangkan negara-negara yang semula menganut sistem sosialis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan serta inisiatif-inisiatif individu.

Ekstein dalam Abu Helmi (2003) mengungkapkan beberapa kelemahan-kelemahan dari mekanisme pasar yang menyebabkan pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan ekonomi :

a). Adanya Barang Kolektif (*collective goods*)

Barang kolektif adalah barang atau jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. Barang dan jasa tersebut harus disediakan bagi orang-orang sebagai golongan dan bukan sebagai individu, dimana penyediaannya tidak dapat dibatasi hanya pada orang-orang yang bersedia membayarnya saja. Barang dan jasa demikian itu tidak dapat ditarik dari konsumsi apabila ada sebagian orang atau individu yang menolak untuk membayarnya, sebagai contoh pertahanan nasional.

Namun tidak semua barang yang disediakan bagi semua orang diterapkan juga secara bersama-sama disebut *collective goods*. Dalam beberapa hal *exclusive principle* diterapkan juga, yaitu dalam hal pendidikan misalnya. Dimana pendidikan disediakan oleh pemerintah bagi setiap anggota masyarakat tetapi hanya orang-orang yang bersedia membayarnya diperkenankan untuk memanfaatkan jasa-jasa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Kesimpulannya bahwa dalam hal menghasilkan barang kolektif, swasta tidak tertarik untuk berkecimpung didalamnya hal ini karena mereka sulit untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) maka pemerintahlah yang harus mengusahakannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat (*social oriented*).

b). Perbedaan Antara *Private cost* dan *Social cost*

Dalam perekonomian pada umumnya persaingan sempurna merupakan suatu alat yang dapat memaksimumkan keuntungan (*profit*) bagi produsen dan memaksimumkan kepuasan (*utility*) bagi konsumen melalui penentuan harga barang-barang dan jasa-jasa didalam perekonomian tersebut. Jadi hanya merupakan alat yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara biaya (*cost*) dan keuntungan yang diperoleh (*benefit*).

Bagi seorang produsen swasta dalam hal tertentu tidak harus membayar semua biaya yang terjadi dalam perekonomian yang timbul karena kegiatannya dan dilain pihak ia mungkin sekali tidak dapat menarik keuntungan atau manfaat seluruhnya yang timbul dari usaha yang sama tersebut. Hanya yang digunakannya dalam mengambil keputusan tidak akan benar-benar mencerminkan nilai yang ditimbulkannya dalam perekonomian karena kegiatannya itu. Sehingga akhirnya keputusan swasta yang didasarkan atas harga tersebut tidak akan mencapai tujuan masyarakat yang maksimal. Perbedaan ini sering diakibatkan oleh adanya *external economies* dan *diseconomies*. Karena kedua hal ini tidak dapat diperhitungkan secara langsung sebagai biaya *external economies* dan *diseconomies* maka hal ini harus dibiayai oleh pemerintah.

#### c). Adanya Resiko Yang Sangat Besar

Semua orang sebagai individu maupun bersama-sama selalu berusaha untuk menekan resiko yang mungkin terjadi menjadi sekecil mungkin. Dalam kenyataannya masing-masing kegiatan atau usaha memiliki resiko sendiri-sendiri, ada yang resikonya ringan tetapi ada pula yang resikonya sangat berat. Umumnya usaha yang memiliki resiko yang sangat berat tidak akan dijalankan oleh swasta. Sebagai contoh untuk mendirikan sumber tenaga atom sebagai pembangkit tenaga listrik, diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang lama untuk dapat menuai hasil atau manfaatnya. Pemanfaatan hasil dari usaha itu tidak mungkin dimonopoli oleh seorang yang mengusahakannya, tetapi biasanya oleh seluruh anggota masyarakat sehingga sudah pasti pihak swasta tidak akan mau menanggung resiko kegiatan itu. Karena itu pemerintahlah yang cocok untuk mengusahakannya.

#### d). Sifat-Sifat Monopoli

Banyak usaha-usaha tertentu yang sebaiknya diusahakan secara monopoli artinya usaha tersebut dikelola secara profesional oleh sebuah organisasi yang menghasilkan jasa-jasa dan barang-barang untuk kepentingan masyarakat. Jenis usaha ini mempunyai sifat-sifat tertentu yaitu besaran biaya rata-ratanya selalu menurun dengan semakin banyaknya barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkannya (*decreasing cost activities*).

Sehingga ketika usaha ini dilakukan oleh banyak perusahaan, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan keuntungan karena dengan pasar tertentu

jumlah barang yang dihasilkan akan terlalu banyak dan harus dijual pada tingkat harga yang sangat rendah. Sehingga satu-satunya cara adalah barang-barang seperti itu harus dihasilkan oleh seorang pengusaha tunggal atau seorang monopolis. Berhubung monopoli selalu menghasilkan kerugian sosial (*social loss*) dan karena barang tersebut biasanya juga untuk keperluan orang banyak maka kegiatan tersebut haruslah ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu monopoli lebih merupakan organisasi yang cocok untuk mewadahi jenis usaha tersebut, tetapi hendaknya diingat bahwa tanpa campur tangan pemerintah, maka akan timbul kerugian sosial yang besar dalam masyarakat karena penentuan harga yang kurang adil oleh monopolis tersebut. Usaha ini misalnya dalam hal penyediaan listrik, gas telepon, dan sebagainya. Dimana dalam memproduksinya dikehendaki produksi yang banyak dengan harga yang murah.

#### e). Adanya Inflasi dan Deflasi

Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan inflasi dan deflasi secara otomatis. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi maupun deflasi dengan menggunakan kekuasaannya. Pemerintah dapat menggunakan politik fiskalnya untuk dapat mengendalikan tekanan inflasi ataupun deflasi tersebut. Misalnya apabila ada kenaikan harga-harga umum (inflasi) maka pemerintah dapat menjalankan politik fiskalnya melalui penghematan pengeluaran atau peningkatan penerimaan negara melalui pajak.

f). Adanya Perkembangan Perusahaan dan Pabrik

Dengan mekanisme pasar perusahaan dan pabrik dapat berkembang tetapi dengan semakin berkembangnya pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan tersebut maka kemampuan pengawasannya secara otomatis akan menjadi semakin lemah sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan out put dan kesempatan kerja. Perkembangan pabrik atau perusahaan tersebut tidak dapat dicegah begitu saja melainkan memerlukan campur tangan pemerintah, baik bagi perkembangannya maupun pengaruhnya.

g). Adanya Distribusi Pendapatan Yang Tidak Merata

Mekanisme pasar tidak dapat mempersempit atau mengurangi perbedaan pendapatan yang semakin tajam dalam masyarakat. Dengan mekanisme pasar maka golongan kaya akan semakin kaya sedangkan golongan lemah akan semakin miskin dan tertindas. Perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan kecil yang tidak mampu melakukan persaingan dengan mereka. Dimana perusahaan besar akan mampu membeli masukan (*input*) dengan harga yang mahal dan mampu menjual hasil (*out put*) dengan harga yang murah guna menyaingi perusahaan-perusahaan yang kecil.

Dengan melihat kelemahan-kelemahan dari mekanisme pasar diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Sehingga kita dapat menggolongkan bentuk kegiatan campur tangan pemerintah tersebut menjadi empat kelompok yaitu :

- 1). Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Dimana kegiatan ini untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu, yang secara efektif tidak dapat dipuaskan melalui mekanisme pasar.
- 2). Kegiatan dalam mengatur redistribusi atau mentransfer penghasilan. Hal ini akan memberikan koreksi terhadap distribusi pendapatan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3). Kegiatan menstabilisasikan perekonomian. Hal ini menggabungkan antara kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat (*aggregate demand*). Sehingga dapat mempertahankan *full employment* dan menghindari inflasi maupun deflasi.
- 4). Kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi.

## **2.2. Anggaran Pembangunan Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Anggaran Pembangunan Daerah**

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan senantiasa mengacu pada trilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi). Pemerintah mengambil beberapa kebijakan penting yang tertuang dalam rencana program anggaran, terutama yang terkait langsung dengan bidang keuangan pemerintah atau lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah juga dituntut harus memiliki sejumlah rencana yang matang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Anggaran keuangan bagi daerah adalah merupakan hal yang sangat substansial dan menjadi penentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di daerah. Alokasi anggaran pemerintah yang lebih dikenal sebagai anggaran keuangan daerah menyangkut tentang alokasi penerimaan dan pengeluaran yang merupakan rencana dan gambaran kegiatan serta dinyatakan dalam bentuk angka-angka untuk jangka waktu tertentu atau biasa disebut budget (APBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kesempatan lain **DJ. Mamesah (1995)** memberikan batasan dan defenisi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan penerimaan.



Sedangkan Suparmoko (1987) mendefinisikan bahwa anggaran (*budget*) merupakan daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adapun batasan defenisi anggaran adalah sebagai rencana operasional tahunan pemerintah yang merupakan pengajawentahan rencana pembangunan Jangka Menengah (Repelita) dan Jangka Panjang.

### 2.2.2. Manfaat Anggaran Pembangunan Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Demikian halnya Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam bab penjelasan PP No. 58 tahun 2005 khususnya pasal 16 ayat 3 disebutkan :

- a. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- b. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- c. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

**Musgrave** dalam **Arsyad (1992)** menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi keuangan pemerintah yaitu sebagai :

1. Fungsi Alokasi, adalah merupakan proses dimana sumber daya (*resources*) nasional yang digunakan untuk barang privat (*private goods*) dan barang publik (*public goods*), dimana kedua jenis barang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Fungsi Distribusi, pada hakekatnya merupakan penyesuaian terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadilan. Misi pemerataan pendapatan yang diemban oleh pemerintah tersebut dilaksanakan melalui sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran dari anggaran. Sisi penerimaan terutama pada pajak sebagai instrumen bagi pemerintah untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan yaitu dengan melalui pajak penghasilan dengan struktur tarif progresif. Sisi pengeluaran dari anggaran dapat juga menjadi instrumen dalam pembagian kembali pendapatan melalui program pembayaran transfer (*transfer payment*) atau subsidi.
3. Fungsi Stabilisasi, penggunaan kebijaksanaan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi dengan

memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Sedangkan **Kunarjo (1996)** menyatakan bahwa penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta.
2. Fungsi distribusi, dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan distribusi pendapatan antar warga negara dalam upaya memperkecil ketimpangan ekonomi.
3. Fungsi stabilisasi, dimaksudkan sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam menjamin terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Selanjutnya **K. J. Davay** dalam **Abu Helmi (2003)** mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari alokasi anggaran pemerintah pusat kepada daerah diantaranya adalah :

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebahagian, biaya pelayanan atau program-program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional, yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional.
2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program-program dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional

memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Sedangkan **Kunarjo (1996)** menyatakan bahwa penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta.
2. Fungsi distribusi, dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan distribusi pendapatan antar warga negara dalam upaya memperkecil ketimpangan ekonomi.
3. Fungsi stabilisasi, dimaksudkan sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam menjamin terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Selanjutnya **K. J. Davay** dalam **Abu Helmi (2003)** mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari alokasi anggaran pemerintah pusat kepada daerah diantaranya adalah :

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebahagian, biaya pelayanan atau program-program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional, yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional.
2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program-program dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional

3. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, baik upaya untuk membantu percepatan pertumbuhan maupun memperkecil ketimpangan antar wilayah.
4. Mengendalikan pengeluaran daerah untuk memastikan penyesuaian terhadap standar kebijakan nasional.
5. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil dan merata.
6. Mengembangkan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka.
7. Membantu daerah-daerah untuk mengatasi keadaan darurat.

Sedangkan **D.J. Mamesah (1995)** mengemukakan bahwa, dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) ada empat prinsip yang harus diperhatikan :

1. Prinsip kemandirian, dimana adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta adanya upaya ketepatan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan pada instansi yang lebih tinggi.
2. Prinsip prioritas, dimana dalam penyusunan anggaran diupayakan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana.
3. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, dimana pengendalian pembiayaan dan penghematan yang meluas pada prioritas daerah tersebut.
4. Prinsip disiplin anggaran, dimana setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggung jawabannya, serta tidak melaksanakan

kegiatan atau proyek yang tidak tersedia atau belum tersedia kredit anggarannya dalam APBD.

### 2.2.3. Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan

Dalam upaya membiayai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya setelah dibelakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka secara garis besar sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari :

- a. Sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, baik dari pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat.
- b. Sumber yang berasal dari luar daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun investasi swasta.

**Kunarjo (1996)** menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan melalui dua jalur yaitu dana sektoral (DIP) dan regional (Inpres). Pembiayaan pembangunan melalui sistim DIP direncanakan melalui sistim *bottom up* dengan pengambilan keputusan tingkat departemen. Prioritas pembangunan berorientasi pada sektor dengan para pelaksana berasal dari aparatur yang ada di daerah, dimana penentuan pimpinan proyek ditetapkan oleh Menteri. Dana DIP ini disalurkan melalui departemen teknis yang mempunyai aparat sendiri di daerah dan tidak melalui pemerintah daerah. Sedangkan dana pembangunan daerah yang berasal dari dana regional, sepenuhnya dapat diamati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah yang bersangkutan, dimana sumber-sumber penerimaan yang

berasal dari daerah itu sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) serta bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dalam kesempatan lain **K.J. Davay** dalam **Abu Helmi (2003)** mengungkapkan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat disebut sebagai transfer pemerintah dan memiliki peranan yang sangat strategis bagi tatanan pemerintah daerah. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat terdiri dari :

1. Jatah berdasarkan suara (*vote*) atau anggaran langsung. Jenis alokasi ini terdapat dalam anggaran nasional yang memiliki jumlah tertentu untuk tujuan tertentu pula yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran dalam batas-batas tertentu.
2. Kapitalisasi (*capitalization*) penanaman modal saham oleh pemerintah pusat dalam pemerintah daerah yang dimanfaatkan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
3. Uang hasil pajak (*tax sharing*), pengalokasian sebahagian atau seluruhnya dari penerimaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
4. Alokasi kepada pemerintah daerah melalui pinjaman pemerintah pusat dimana dapat diberikan secara langsung atau melalui lembaga kredit yang terpusat.
5. Alokasi yang diberikan dalam bentuk yang paling lazim berupa hibah maupun subsidi.

Selanjutnya menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya didalam

pasal 10 dijelaskan bahwa pada dasarnya terdapat tiga sumber dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu :

1. Bagi hasil pajak dan penerimaan sumber daya alam (SDA)

Salah satu komponen dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu pembagian hasil penerimaan sumber daya alam (SDA) dan penerimaan perpajakan (tax sharing ). Yang termasuk didalam bagi hasil pajak: (a) Pajak bumi dan bangunan, (b) Bea Perolehan atas tanah dan bangunan dan (c) Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, sedangkan pembagian hasil penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi (a) Pertambangan minyak bumi, (b) Pertambangan gas alam, (c) Pertambangan Umum, (d) Pertambangan panas bumi, (e) Kehutanan, dan (f) Pertanian.

2. Dana alokasi umum

Dana alokasi umum (*block grant*) pada tahun anggaran (APBD) sebelum tahun 2001 bersumber dari dana Subsidi Daerah Otonom dan Dana Inpres yang ditransfer dari APBN yang dikelompokkan menjadi DAU.

3. Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan wewenang pemerintah daerah.]



#### 2.2.4. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

**Kunarjo (1996)** mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan dalam mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan prasarana dan sarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebahagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Dengan komposisi dari pengeluaran tersebut akan terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya lebih diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran pembangunan atau sebaliknya.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa pada dasarnya pengeluaran pemerintah terdiri dari :

##### 1. Pengeluaran Rutin

Yaitu pengeluaran yang dikaitkan dengan yang sifatnya terus menerus seperti aktivitas pengeluaran, pembinaan, bimbingan dan sebagainya.

Pengeluaran rutin ini meliputi :

a). Belanja Pegawai atau Pensiunan

Pengeluaran-pengeluaran yang tercakup didalamnya adalah : tunjangan beras, gaji atau pensiunan, lauk pauk untuk TNI-Polri serta lain-lain belanja dalam dan luar negeri.

b). Belanja barang

Dibedakan atas belanja barang dalam dan luar negeri.

c). Subsidi daerah otonom

d). Bunga dan cicilan hutang

e). Lain-lain pengeluaran rutin

2. Pengeluaran Pembangunan

Yaitu kebijakan anggaran pembangunan yang lebih ditekankan pada pengalokasian dana pembiayaan pembangunan pada program atau proyek yang mendukung tercapainya tujuan pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan.

Pengeluaran pembangunan diarahkan pada proyek-proyek yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor-sektor pertanian dalam rangka swasembada pangan, serta industri yang menghasilkan mesin, serta pada bidang dan sektor-sektor lain yang menunjang tercapainya sasaran pertumbuhan dan kesinambungan struktur perekonomian. Pengeluaran pembangunan diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek yang diprioritaskan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sekaligus juga menunjang tercapainya sasaran kestabilan perekonomian.



Sementara oleh Suparmoko (1987) membedakan pengeluaran negara dalam beberapa macam yakni :

1. Pengeluaran yang *self liquidating* sebahagian untuk seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang *refroduktif*, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan yang ekonomis bagi masyarakat dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dari sasaran pajak maka pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.
3. Pengeluaran yang *tidak self liquidating* maupun *tidak reproduktif*, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran, pada satu sisi terjadi pemborosan namun pada sisi lain yang menerima mengalami kenaikan pendapatan.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa yang akan datang pada saat usia lanjut akan jauh lebih besar.

### 2.3. Perekonomian, Anggaran dan Peran Pemerintah

Pada dasarnya arah tujuan umum yang ingin dicapai pelaksanaan kebijakan ekonomi adalah terciptanya keseimbangan intern dan eksteren. Keseimbangan intern diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja yang meningkat dan laju inflasi yang rendah.

Berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah (APBD) khususnya anggaran belanja pembangunan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka hal tersebut dapat dilihat dari hubungan pertimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sehingga dalam hubungan anggaran dikenal beberapa prinsip yaitu :

#### 1. Anggaran berimbang dan dinamis

Berimbang maksudnya jumlah keseluruhan penerimaannya sedang dinamis berarti dalam hal penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula, maka pemerintah akan mengurangi pengeluarannya agar tetap terjaga keseimbangan. Demikian juga dengan penerimaan, apabila melampaui rencana semula maka untuk menjaga keseimbangannya pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya. Penerapan prinsip ini pada perekonomian berpengaruh terhadap stabilitas (menghindari inflasi), yang diasumsikan banyak tergantung dari tingkat ekspansi pengeluaran maupun tingkat kontraksi dari penerimaan.

## 2. Anggaran defisit.

Anggaran defisit adalah anggaran yang apabila pengeluaran pemerintah melampaui pendapatannya. Maka pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perekonomian bersifat ekspansif.

## 3. Anggaran surplus

Anggaran surplus yaitu anggaran yang apabila penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluarannya. Maka pengaruh yang akan ditimbulkannya terhadap kehidupan ekonomi bersifat kontraktif terhadap tenaga kerja, produksi maupun output daerah dan sektor yang lain.

**Nurjaman Arsyad, (1992)**, mengemukakan bahwa bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, maka prinsip anggaran defisit yang lebih tepat ditetapkan karena akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga peranan pemerintah sebagai pemegang kewenangan dibidang anggaran diharapkan mampu memaksimalkan fungsi penting tersebut melalui kebijakan anggaran di daerah (APBD), yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya.

Pada dasarnya pengeluaran negara yang meliputi anggaran belanja rutin dan pembangunan selalu didasarkan atas pemenuhan kebutuhan rutin pemerintah, pertimbangan stabilitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang tumbuh karena pertumbuhan keadaan negara dan masyarakat, sekaligus juga dimaksudkan untuk usaha-usaha pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

### 2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk dapat mengukur sejauh mana pembangunan maupun sasaran serta target pembangunan yang ingin dicapai, maka diperlukan berbagai alat analisis salah satu diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan konsep dari BPS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PDRB adalah nilai yang ditimbulkan oleh aktifitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan-bahan baku/penolong sehingga lebih dekat pada konsumen atau nilai yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Nilai-nilai dari PDRB tersebut dapat dihitung dengan melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah (satu tahun).
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit serta ekspor netto (setelah dikurangi impor), dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Dari segi penyajiannya, PDRB selalu dibedakan kepada dua pendekatan yaitu, (a) PDRB atas harga berlaku dan (b) PDRB atas harga konstan. Adapun yang dimaksud dengan PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah merupakan jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap pada tahun dasar.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa dalam penyusunan PDRB akan diperoleh manfaat seperti :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor,
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah,
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi), dan
4. Sebagai suatu indikator mengenai tingkat kemakmuran.

### **2.3.2. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian**

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian, khususnya dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan nasional maupun daerah. Dimana dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang desentralisasi yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana undang-undang ini merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah

untuk lebih memainkan peranannya dalam perekonomian didaerahnya masing-masing.

Sehingga begitu pentingnya campur tangan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka J. M. Keynes kemudian pada tahun 1930-an ketika terjadi depresi besar-besaran menegaskan hal tersebut. Analisis Keynes ini kemudian selanjutnya mendasari bagaimana pemerintah membuat suatu kebijakan pengeluaran dan penerimaan (*fiscal policy*) dapat mempengaruhi pembentukan, pembagian dan penggunaan pendapatan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut **Sarundajang (1999)** menguraikan dua pandangan tentang peranan yang harus dimainkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Menekankan peranan pemerintah daerah sebagai ungkapan dari kemauan dan identitas masyarakat setempat. Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politik, dalam arti bahwa pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan persoalan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka. Hubungan keuangan pusat dan daerah harus dapat memungkinkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah, sehingga tiap-tiap tingkatan memiliki lingkup pemilihan sendiri.
2. Pemerintah daerah pada dasarnya adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, sebagai alat yang tepat untuk





menentukan biaya, memberikan layanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian antara lain adalah (a) melalui anggaran belanja, (b) melakukan proses produksi barang-barang dan jasa-jasa publik, (c) menjalankan pengawasan atas produksi (pendekatan secara kontrol).

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, terdapat 11 (sebelas) bidang pemerintahan diantaranya adalah: (a) Bidang pekerjaan umum, (b) Bidang kesehatan, (c) Bidang pendidikan dan kebudayaan, (d) Bidang pertanian, (e) Bidang perhubungan, (f) Bidang industri dan perdagangan, (g) Bidang penanaman modal, (h) Bidang lingkungan hidup, (i) Bidang pertanahan, (j) Bidang koperasi dan terakhir adalah (k) Bidang ketenagakerjaan.

Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka dilakukan skala prioritas terhadap sektor-sektor yang unggulan. Dimana sektor unggulan adalah sektor yang menunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Walaupun pengeluaran pemerintah secara keseluruhan memegang peranan penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran itu sendiri. Komposisi dari pengeluaran memegang peranan yang strategis dalam upaya mencapai sasaran

pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Sehingga melalui komposisi pengeluaran, akan terjawab pertanyaan sektor manakah yang menjadi prioritas dibanding sektor-sektor lainnya.

Dalam menentukan sektor prioritas pembiayaan, ada beberapa kriteria pengalokasian anggaran yang harus diperhatikan yakni faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor politik, dan faktor administrasi. Pertimbangan faktor ekonomi menyangkut efisiensi dan keuntungan yang diperoleh dari pengalokasian anggaran. Faktor teknologi menyangkut kemampuan penyerapan teknologi yang lebih tinggi dari adanya alokasi anggaran. Selanjutnya faktor politik menyangkut kepentingan stabilitas keamanan dan kepentingan tertentu lainnya. Faktor lingkungan menyangkut kemampuan menjaga kelestarian alam serta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sementara faktor administrasi menyangkut kemampuan kelembagaan dan pengelolaan alokasi anggaran dimaksud.

Berangkat dari kriteria diatas, maka pengalokasian anggaran dapat diklasifikasikan menurut sektor dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kebijakan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Kriteria dasar penentuan sektor unggulan adalah :

1. Tingkat kemampuan sektor dalam memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB.
2. Tingkat kemampuan menyerap tenaga kerja.

3. Potensi menghasilkan komoditas ekspor.
4. Tingkat keterkaitan antar sektor yang kuat.

Dengan kriteria diatas, dilakukan analisis terhadap seluruh sektor pembangunan dan lapangan usaha didaerah :

1. Memberikan bantuan dana sebagai modal usaha.
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan ekonomi rakyat.
3. Penyediaan prasarana dan sarana dalam memperlancar distribusi hasil produksi barang dan jasa masyarakat.
4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
5. Penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam pola dasar pembangunan daerah propinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi perekonomian dan keunggulan komparatif yang perlu dikembangkan sebagai sektor-sektor unggulan ini, sektor-sektor lain akan ikut bertumbuh dan akan menimbulkan *multiplier efect* ganda yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor-sektor unggulan dalam pola dasar pembangunan propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sektor pertanian dan kehutanan yang menjadi dasar dalam pengembangan agrobisnis dan agroindustri.

2. Sektor pertambangan dan energi merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi basis pengembangan industri bagi produk-produk pertanian di wilayah sekelilingnya.
3. Sektor pariwisata yang mempunyai potensi besar dan beraneka ragam yang apabila dikembangkan secara maksimal maka dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.
4. Sektor transmigrasi dan pemukiman yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka penyediaan tenaga kerja dalam upaya pengembangan pertanian dan sektor lain di Sulawesi Selatan.
5. Sektor transportasi dan komunikasi yang sangat mendukung semua kegiatan pembangunan daerah.

Semua sektor tersebut ditempuh berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang tujuan fungsionalnya adalah menyajikan prioritas perencanaan, mengidentifikasi sasaran pada masing-masing sektor, pengalokasian dana sesuai dengan penekanan pada sektor bersangkutan, penentuan biaya serta untuk menentukan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, diharapkan terciptanya perekonomian daerah yang kokoh dan mandiri sebagai usaha bersama sesuai dengan azas kekeluargaan, mempekokoh struktur perekonomian daerah yang seimbang antar sektor sehingga mampu tumbuh atas kekuatan sendiri. Dengan industri yang kuat dan maju serta pertanian yang tangguh, diharapkan hal ini mampu menciptakan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, maka partisipasi aktif dan daya kreasi unit-unit ekonomi dapat meningkat lebih lanjut dengan instrumen peraturan daerah (PERDA) dan APBD. Dengan perkembangan sektor-sektor unggulan, maka diharapkan hal ini akan mampu menciptakan *trickle down effect* sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

### 2.3.3. Penelitian Terdahulu

**Akhmad Syafruddin (2001)**, telah melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan alokasi anggaran pembangunan daerah serta perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada kriteria - kriteria yang digunakan dalam menunjang pengalokasian anggaran pembangunan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dihubungkan dengan 9 sektor PDRB dengan hasil 8 sektor terjadi perbedaan yang berarti perkembangannya tidak searah dan 1 sektor yang tidak menunjukkan perbedaan, yang berarti terjadi perkembangan searah.

Hal tersebut berarti bahwa dari 8 sektor yang terdapat perbedaan menunjukkan pengalokasian anggaran pembangunan tidak secara langsung meningkatkan PDRB namun terlebih dahulu melalui proses pada periode tertentu, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.

Sementara **Abu Helmi (2003)**, juga telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara fungsi - fungsi anggaran pembangunan daerah dan investasi swasta terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan investasi swasta dan anggaran pembangunan berdasarkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan PDRB propinsi Kalimantan Timur.

Sementara secara parsial, variabel investasi swasta dan variabel anggaran pembangunan berdasarkan fungsi distribusi dan stabilisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB Propinsi Kalimantan Timur, kecuali variabel anggaran pembangunan berdasarkan fungsi alokasi.

## 2.4. Kerangka Fikir Penelitian dan Hipotesis

### 2.4.1. Kerangka Fikir Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah, dimana indikator keberhasilannya dapat diukur dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), meningkatnya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih, serta meningkatnya pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembangunan daerah, maka dibutuhkan sejumlah investasi untuk menyediakan infrastruktur yang dibiayai dari alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pembangunan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga diperlukan perencanaan

pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan segala prioritas, khususnya pada sektor-sektor unggulan.

Dari alokasi anggaran pembangunan yang diinvestasikan melalui pembiayaan infrastruktur dasar yang merupakan daya dorong bagi perkembangan ekonomi daerah dan secara khusus terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, maka diharapkan hal ini pada akhirnya akan mempercepat proses pengembangan ekonomi pada masing-masing sektor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam pengukuran hubungan antara alokasi anggaran pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan selanjutnya hal ini akan mampu meningkatkan pendapatan perkapiata masyarakat, maka untuk lebih jelasnya hal ini dapat dijelaskan secara skematis pada skema 2.1. berikut.

#### **2.4.2. Hipotesis**

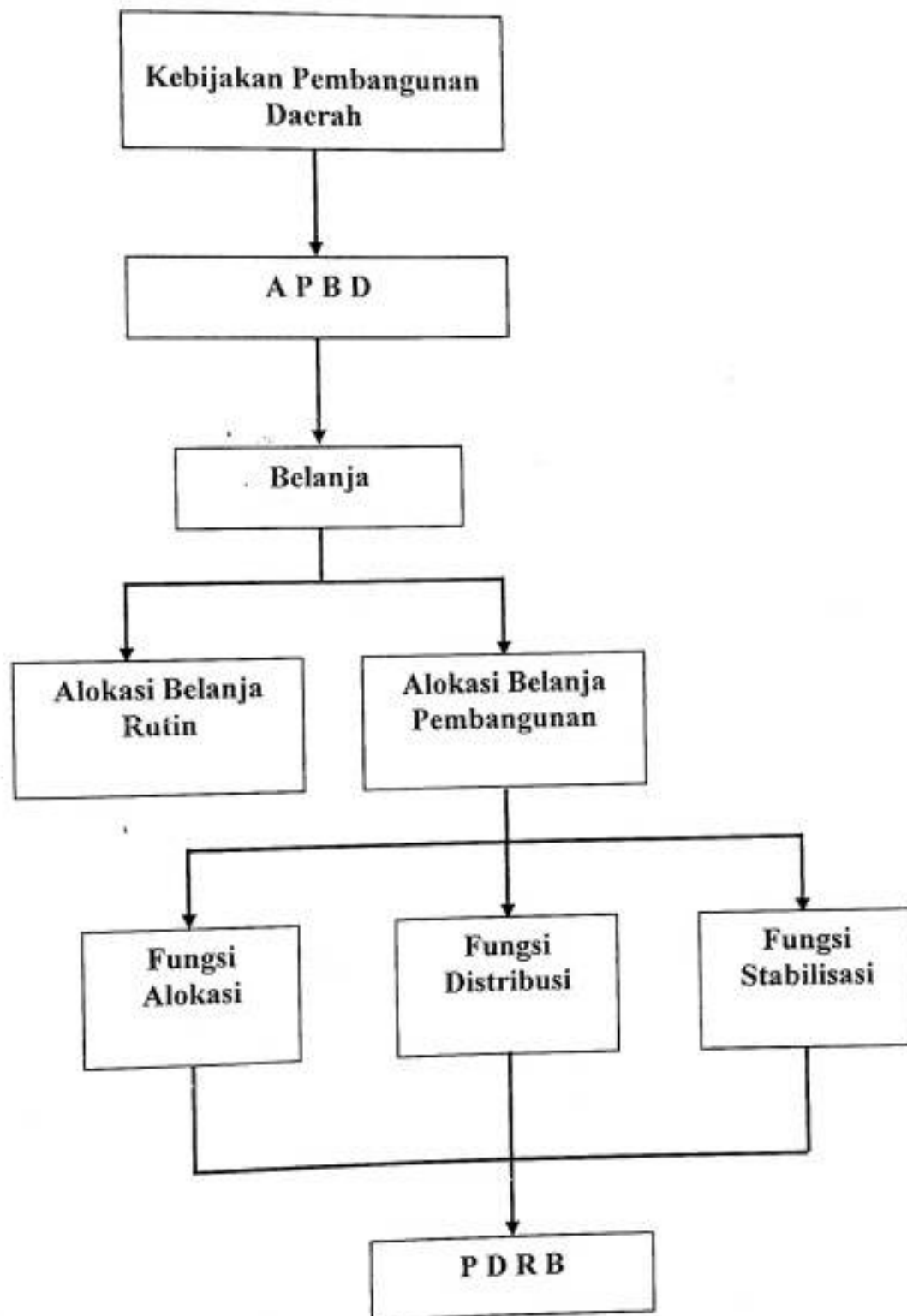
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan teori-teori yang mendukungnya serta beberapa hasil studi empiris diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga anggaran belanja pembangunan, yang mengarah ke fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi mempunyai peranan yang cukup berarti dan signifikan dalam membentuk PDRB propinsi Sulawesi Selatan.

2. Diduga alokasi anggaran pembangunan yang mengarah ke fungsi Alokasi, mempunyai peranan yang lebih dominan dalam membentuk PDRB propinsi Sulawesi Selatan.



**Skema 2.1. Hubungan Alokasi Anggaran Pembangunan Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif. Dimana peneliti dalam melihat sejauh mana pengaruh realisasi alokasi anggaran pembangunan yang mengarah ke fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi terhadap perkembangan PDRB propinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode kuantitatif progresif sampling.

Progresif sampling merupakan metode penelitian, dimana peneliti membatasi kurun waktu penelitian (time series) guna memfokuskan penelitian. Kurun waktu yang menjadi fokus penelitian adalah antara tahun 1994-2004.

#### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencermati secara langsung ke objek penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui pengumpulan informasi atau menelaah dokumen dan laporan yang dalam hal ini merupakan data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 3.3. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui dinas atau instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Sulawesi Selatan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) propinsi Sulawesi Selatan

Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai teori-teori, defenisi atau pengertian serta referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3.4. Metode Analisis

Model analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah model regresi berganda (*multiple regresion*), dimana model ini akan memperlihatkan hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan merupakan variabel terikat, sedangkan anggaran pembangunan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi sebagai variabel bebasnya.

Posisi nilai PDRB harga konstan (tahun t-2) merupakan fungsi dari, anggaran fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagai variabel bebasnya, sehingga hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Yp_t = f ( Al_{t-2}, Ds_{t-2}, St_{t-2} ) \dots\dots\dots (1)$$

Atau secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas (Sudrajat, 1984)

yaitu :

$$Yp_t = \beta_0 Al_{t-2}^{\beta_1} Ds_{t-2}^{\beta_2} St_{t-2}^{\beta_3} e^{\mu} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

$Yp_t$  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan, tahun t  
(Rupiah)

$Al_{t-2}$  = Anggaran pembangunan fungsi alokasi, tahun t-2 (Rupiah)

$Ds_{t-2}$  = Anggaran pembangunan fungsi distribusi, tahun t-2 (Rupiah)

$St_{t-2}$  = Anggaran pembangunan fungsi stabilisasi, t-2 (Rupiah)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Parameter/Koefisien regresi yang hendak diukur

$\beta_0$  = Konstanta

$\mu$  = Error term

Karena persamaan (2) adalah merupakan persamaan non linear, maka untuk memperoleh nilai elastisitasnya maka persamaan tersebut diubah menjadi persamaan linear dengan menggunakan logaritma natural (Ln), sehingga persamaan (2) menjadi:

$$\ln Y_{p_t} = \beta_0 + \beta_1 \ln Al_{t-2} + \beta_2 \ln Ds_{t-2} + \beta_3 \ln St_{t-2} + \mu \dots\dots (3)$$

Dimana :

$\ln Y_{p_t}$  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan, tahun t (Rupiah)

$\ln Al_{t-2}$  = Anggaran pembangunan fungsi alokasi, tahun t-2 (Rupiah)

$\ln Ds_{t-2}$  = Anggaran pembangunan fungsi distribusi, tahun t-2 (Rupiah)

$\ln St_{t-2}$  = Anggaran pembangunan fungsi stabilisasi, tahun t-2 (Rupiah)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Parameter/Koefisien regresi yang hendak diukur

$\beta_0$  = Konstanta

$\mu$  = Error term

Untuk dapat mengambil keputusan sebagai hasil dari pengujian hipotesis, maka hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari koefisien regresi antara variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat (dependent variabel) yang melalui beberapa pengujian yaitu :

1. Statistik uji t ( t test)

Hal ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Dikatakan signifikan jika t hitung > dari t tabel dengan taraf nilai uji 5 %.

2. Statistik uji nilai R (koefisien korelasi)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3. Statistik uji nilai  $R^2$  ( koefisien determinasi berganda)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar  $R^2$  maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, begitupun juga sebaliknya.

4. Statistik uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dengan tingkat taraf uji 5 %. Signifikan bila F hitung sama atau lebih besar dari F tabel.

### 3.5. Batasan Operasional Variabel

Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi inti pembahasan yaitu :

1. Anggaran pembangunan adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan baik yang berupa fisik maupun yang non fisik di propinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam tulisan ini digunakan data *time series* realisasi APBD dari tahun 1992 – 2002. Adapun sektor masing-masing fungsi alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah pada satu tahun. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun dasar. Untuk melihat kinerja perkembangan ekonomi maka dalam tulisan ini digunakan data *time series* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1994 – 2004 (tahun t).
3. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (tahun t-2).
4. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam menjamin distribusi kekayaan dan pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (tahun t-2).
5. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus diarahkan untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan segala akibatnya terhadap neraca perdagangan dan pembayaran (tahun t-2).

### 3.6. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan, maka gambaran sistematika pembahasan tulisan ini terdiri dari :

## **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang yang mendasari penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan, tujuan penulisan, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas tentang keuangan negara secara teoritis, anggaran pembangunan daerah, perekonomian, anggaran dan peran pemerintah, serta kerangka fikir penulisan dan hipotesis.

## **Bab III : Metodologi Penelitian**

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, sumber dan cara pengumpulan data, model analisis, batasan operasional variabel serta sistematika pembahasan.

## **Bab IV : Sekilas Tentang Profil Sulawesi Selatan**

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari daerah objek penelitian seperti letak geografis, data perkembangan penduduk (demografi), serta data perkembangan (kinerja) ekonomi.

## **Bab V : Pembahasan**

Bab ini membahas tentang anggaran belanja pembangunan dan realisasinya, profil produk domestik regional bruto, hasil perhitungan pengaruh fungsi anggaran belanja pembangunan terhadap PDRB, serta analisis hasil perhitungan.

## **Bab VI : Penutup**

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang ingin disampaikan penulis yang berhubungan dengan judul tulisan.



Tabel 3.1. Pengelompokan Sektor Pembangunan Menurut Fungsi Anggaran

No.	Nama Sektor	Fungsi Anggaran		
		Alokasi	Distribusi	Stabilisasi
	Industri	√		
	Pertanian dan Kehutanan	√		
	Sumberdaya Air dan Irigasi	√		
	Tenaga Kerja	√		
	Perdagangan, Perusahaan Daerah & Koperasi	√		
	Perhubungan	√		
	Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	√		
	Pertambangan & Energi	√		
	Pembangunan Daerah & Pemukiman Kembali		√	
	Lingkungan Hidup & Tata Ruang		√	
	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan			
	Terhadap Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga		√	
	Kependudukan & Keluarga Sejahtera		√	
	Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita			
	Anak & Remaja		√	
	Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Penelitian		√	
	Perumahan & Pemukiman			√
	Agama			√
	Hukum			√
	Aparatur Pemerintah & Pengawasan			√
	Politik, Penerangan, Komunikasi & Media Massa			√
	Keamanan & Ketertiban Umum			√
	Subsidi Kepada Kabupaten/Kota			√

Sumber :  
 PS, Realisasi Anggaran Pembangunan Menurut Sektor  
 U No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  
 P No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

## BAB IV

### SEKILAS TENTANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### 4.1. Letak Geografis

Propinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Kota Makassar terletak antara  $0^{\circ}12'$  -  $80^{\circ}$  lintang selatan dan  $116^{\circ}48'$  -  $122^{\circ}36'$  bujur timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Propinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah timur : Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara
3. Sebelah selatan : Laut Flores
4. Sebelah barat : Selat Makassar dan Propinsi Sulawesi Barat

Secara geografis Sulawesi Selatan membujur dari selatan ke utara dengan panjang garis pantai mencapai 2500 km dengan mempunyai 72 sungai besar dan kecil dengan panjang 3.203 km. Jumlah aliran sungai terbanyak berada di Kabupaten Luwu sedangkan sungai terpanjang yaitu sungai Saddang, dimana sungai ini melalui beberapa daerah yakni meliputi Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar di Sulawesi Barat dengan panjang kurang lebih 150 km.

Di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat 4 danau yaitu danau Tempe dan Sidenreng di kabupaten Wajo serta danau Matano dan Towuti yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah gunung yang tercatat sebanyak 7 gunung, dimana gunung yang tertinggi adalah gunung Rantemario dengan ketinggian 3.440 m di atas permukaan laut yang berdiri tegak diperbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu.

**Tabel 4.1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota  
Di Sulawesi Selatan Tahun 2004**

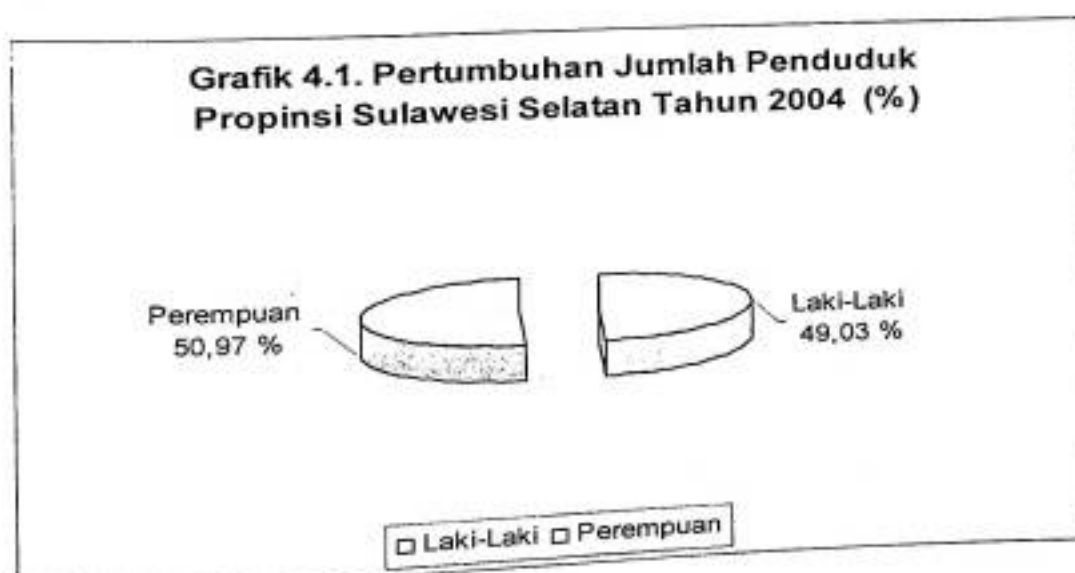
No.	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE THD LUAS SULAWESI SELATAN (%)
1.	SELAYAR	903,50	1,98
2.	BULUKUMBA	1.154,67	2,53
3.	BANTAENG	395,83	0,87
4.	JENEPONTO	737,64	1,62
5.	TAKALAR	566,51	1,24
6.	GOWA	1.883,32	4,13
7.	SINJAI	819,96	1,80
8.	MAROS	1.619,00	3,55
9.	PANGKEP	1.1122,9	2,44
10.	BARRU	1.174,71	2,58
11.	BONE	4.559,00	10,00
12.	SOPPENG	1.359,44	2,98
13.	WAJO	2.506,20	5,50
14.	SIDRAP	1.883,25	4,13
15.	PINRANG	1.961,77	4,30
16.	ENREKANG	1.766,01	3,87
17.	LUWU	2.901,63	6,37
18.	TANA TORAJA	3.205,77	7,03
19.	LUWU UTARA	1.4788,96	32,45
20.	LUWU TIMUR*	-	-
21.	MAKASSAR	175,77	0,39
22.	PAREPARE	99,33	0,22
23.	PALOPO*	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>45.574,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel Dalam Angka 2005)  
\*Data Masih Tergabung Dengan Induk Kabupaten/Kota

Luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang tercatat setelah pemekaran dengan Sulawesi Barat adalah 45.574,48 km<sup>2</sup> yang meliputi 20 Kabupaten dan 3 Kota, dimana Kota Parepare merupakan daerah yang terkecil luasnya yakni hanya sekitar 99,33 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0.22 persen sedangkan yang terluas adalah Kabupaten Luwu Utara yakni sekitar 14.788,96 km<sup>2</sup> atau sekitar 32.45 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

#### 4.2. Demografi

Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2004 yang dituangkan dalam Sulawesi Selatan dalam angka 2004 berjumlah 7.379.370 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten dan kota dimana Kota Makassar adalah merupakan yang terbanyak jumlah penduduknya yakni 1.164.380 jiwa. Secara garis besar jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari seratus. Sampai tahun 2004 jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3.618.045 jiwa dan perempuan 3.761.325 jiwa.



Sumber : BPS Sul-Sel (Sulawesi Selatan Dalam Angka 2005)

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan**

No.	KABUPATEN/KOTA	P E N D U D U K			RASIO JENIS KELAMIN (%)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	SELAYAR	53,222	58,236	111,458	91.39
2.	BULUKUMBA	177,435	196,812	374,247	90.15
3.	BANTAENG	83,447	83,837	167,284	99.53
4.	JENEPONTO	161,771	165,718	327,489	97.62
5.	TAKALAR	116,774	127,808	244,582	91.37
6.	GOWA	283,758	281,494	565,252	100.80
7.	SINJAI	105,767	111,607	217,374	94.77
8.	MAROS	139,885	150,288	290,173	93.08
9.	PANGKEP	131,594	145,629	277,223	90.36
10.	BARRU	76,334	81,346	157,680	93.84
11.	BONE	326,881	360,105	686,986	90.77
12.	SOPPENG	106,387	118,796	225,183	89.55
13.	WAJO	171,560	191,948	363,508	89.38
14.	SIDRAP	120,316	127,407	247,723	94.43
15.	PINRANG	158,586	175,504	334,090	90.36
16.	ENREKANG	90,621	88,037	178,658	102.94
17.	LUWU	152,391	157,197	309,588	96.94
18.	TANA TORAJA	217,979	202,754	420,733	107.51
19.	LUWU UTARA	247,174	227,918	475,092	108.45
20.	LUWU TIMUR*	-	-	-	-
21.	MAKASSAR	577,094	587,286	1,164,380	98.26
22.	PAREPARE	56,237	58,696	114,933	95.81
23.	PALOPO	62,832	62,902	125,734	99.89
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>3,618,045</b>	<b>3,761,325</b>	<b>7,379,370</b>	<b>96.19</b>

Sumber : BPS Sul-Sel, (Hasil SUSENAS 2004)

\*Data Masih Tergabung Dengan Induk Kabupaten/Kota

Dibeberapa daerah, diantaranya Kabupaten Gowa, Enrekang, Tana Toraja dan Luwu Utara menunjukkan rasio jenis kelamin lebih besar dari seratus, hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki di kabupaten tersebut lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.

Dari sisi angkatan kerja, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan. Mereka yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga maupun yang memiliki aktivitas lainnya (lihat tabel 4.3.).

**Tabel 4.3. Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Propinsi Sulawesi Selatan**

KEGIATAN UTAMA	2003		2004	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
<b>A. Angkatan Kerja</b>	<b>3,279,832</b>	<b>50,27</b>	<b>3,241,059</b>	<b>53,78</b>
- Bekerja	3,054,774	46,82	3,005,369	49,87
- Mencari Kerja	225,058	3,45	235,690	3,91
<b>B. Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>3,245,276</b>	<b>49,73</b>	<b>2,784,987</b>	<b>46,22</b>
- Sekolah	1,113,938	17,07	984,460	16,34
- Mengurus RT	1,618,068	24,80	1,334,430	22,14
- Lainnya	513,270	7,86	466,097	7,74
<b>JUMLAH</b>	<b>6,525,108</b>	<b>100,00</b>	<b>6,026,046</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sul-Sel, Hasil SUSENAS 2004 (Data Diolah)

Berdasarkan data penduduk Sulawesi Selatan dalam angka 2004, usia kerja di Sulawesi Selatan berjumlah 6.026.046 jiwa. Dari seluruh penduduk dalam usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja berjumlah 3.241.059 jiwa atau sekitar 53,78 persen dari seluruh penduduk Sulawesi Selatan dan tercatat penduduk yang bekerja sebesar

.005.369 jiwa, dan terdapat 235.690 jiwa yang berstatus sedang mencari pekerjaan. Dari angka tersebut dapat dihitung tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan sampai tahun 2004 yaitu sebesar 7,70 persen. Dimana angka ini merupakan rasio antara pencari kerja dan jumlah angkatan kerja.

Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 dimana yang tercatat sebesar 3.279.832 jiwa, maka angkatan kerja pada tahun 2004 mengalami penurunan dimana yang tercatat sebesar 3.241.059 jiwa. Untuk jumlah yang berkerja pada tahun 2003 tercatat sebesar 3.054.774 jiwa dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 3.005.369 jiwa.

### **4.3. Kinerja Ekonomi**

#### **4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota**

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan, maka data yang digunakan adalah data produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan. Dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.3. berikut ini, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sulawesi Selatan periode tahun 2001-2004 sudah cukup menggembirakan. Dengan laju pertumbuhan positif pada empat tahun terakhir, setelah puncak krisis yang terjadi pada tahun 1998, merupakan indikasi bahwa perekonomian di kabupaten/kota se Sulawesi Selatan mulai berangsur-angsur pulih, walaupun belum sepenuhnya.

**Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota  
se Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2004 (%)**

KABUPATEN/KOTA		2001	2002	2003	2004	RATA-RATA 2001-2004
1.	SELAYAR	3,22	3,46	4,18	4,50	3,84
2.	BULUKUMBA	2,71	3,88	3,64	4,69	3,73
3.	BANTAENG	3,63	5,82	4,89	4,22	4,64
4.	JENEPONTO	3,14	4,15	3,76	2,07	3,28
5.	TAKALAR	3,74	3,98	6,27	4,90	4,72
6.	GOWA	6,02	4,60	4,02	4,87	4,88
7.	SINJAI	4,24	4,55	4,66	5,81	4,82
8.	MAROS	4,67	3,22	3,84	2,17	3,48
9.	PANGKEP	12,91	3,28	1,98	6,19	6,09
10.	BARRU	5,06	5,86	5,96	4,22	5,27
11.	BONE	5,35	5,07	4,56	2,11	4,27
12.	SOPPENG	2,39	4,71	4,02	5,32	4,11
13.	WAJO	3,05	-0,19	4,59	3,07	2,63
14.	SIDRAP	5,62	6,34	4,24	3,29	4,87
15.	PINRANG	5,71	4,23	4,75	5,89	5,15
16.	ENREKANG	3,80	5,17	5,26	5,34	4,89
17.	LUWU	5,93	5,89	6,54	6,11	6,12
18.	TANA TORAJA	2,97	4,16	2,61	4,24	3,50
19.	LUWU UTARA	3,97	5,10	1,23	3,42	3,43
20.	LUWU TIMUR	5,41	-2,79	10,11	8,74	5,37
21.	MAKASSAR	7,30	7,14	8,60	10,17	8,30
22.	PAREPARE	3,02	5,68	5,00	6,23	4,98
23.	PALOPO	9,57	5,11	10,21	7,37	8,07
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>5,11</b>	<b>4,10</b>	<b>5,25</b>	<b>5,20</b>	<b>4,91</b>

Sumber : BPS Sul-Sel, (Indikator Ekonomi Sulawesi Selatan)



Pada periode tahun 2001-2004, beberapa kabupaten/kota mempunyai rata-rata pertumbuhan cukup tinggi, bahkan jauh melebihi rata-rata pertumbuhan Sulawesi Selatan. Daerah itu adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare (lihat tabel 4.4.)



Bila diperhatikan lebih mendalam, walaupun kabupaten/kota tersebut mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahunnya di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, tetapi peranan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan masih relatif kecil kecuali Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur. Disamping rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menempati urutan pertama, sumbangan PDRB daerah ini terhadap total PDRB kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2001-2004 juga masih jauh di atas tiga kabupaten yang menempati urutan rata-rata laju pertumbuhan di atas daerah ini.

Bila dilihat setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2001 terjadi di Kabupaten Pangkep yakni sekitar 12,91 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan pada sub-sektor industri besar dan sedang yang tumbuh cukup tinggi, yakni sekitar 18.64 persen. Dengan hasil semen dari daerah ini, sehingga sub-sektor industri besar dan sedang daerah ini menghasilkan nilai tambah sebesar 734,04 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku), menjadi penyebab lonjakan pertumbuhan sub-sektor tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya ditempati oleh Kota Palopo. Daerah yang mengandalkan perekonomiannya pada sub-sektor tanaman perkebunan dan sub-sektor perikanan ini tumbuh 11,86 persen. Sementara pada tahun yang sama, perekonomian

di Kabupaten Soppeng hanya tumbuh 2,39 persen dan inilah daerah dengan pertumbuhan terendah.

Setahun kemudian, yakni pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota relatif homogen, tidak ada daerah yang mempunyai pertumbuhan yang sangat tinggi. Angka pertumbuhan pada tahun ini berkisar antara -2,79 sampai dengan 7,14 persen, dimana yang tertinggi dicapai oleh Kota Makassar, daerah yang mengandalkan perekonomiannya pada aktivitas perdagangan dan jasa. Disusul kemudian oleh Kabupaten Sidrap dengan 6,34 persen. Sementara daerah dengan pertumbuhan terendah pada tahun ini ditempati oleh Kabupaten Luwu Timur.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2003 relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya, yakni berkisar antara 1,12 sampai dengan 10,21 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dengan mengandalkan pada sub-sektor tanaman perkebunan dan sub-sektor perikanan menempati urutan teratas. Kabupaten Luwu Timur menempati urutan pertumbuhan tertinggi kedua dengan angka sebesar 10,11 persen, walaupun pada tahun sebelumnya merupakan daerah dengan pertumbuhan terendah. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah ditempati oleh Kabupaten Luwu Utara.

Pada tahun 2004, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Makassar yakni sebesar 10,17 persen. Disusul kemudian oleh Kabupaten Luwu Timur, dengan mengandalkan kegiatan sektor ekonominya pada kegiatan pertambangan nikel, yang mempunyai pertumbuhan sebesar 8,74 persen. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2004 adalah ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

### 4.3.2. Struktur Ekonomi

Manfaat lain dari angka perkembangan PDRB adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB daerah tersebut. Struktur ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2000-2004 tidak mengalami pergeseran yang berarti (lihat tabel 4.5.). Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Selatan masih cukup besar yakni rata-rata 37,67 persen, tingginya peranan ini terutama ditopang oleh sub-sektor tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk Sulawesi Selatan masih mengandalkan mata pencahariannya pada sub-sektor tanaman pangan.

**Tabel 4.5. Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2004 (%)**

LAPANGAN USAHA		2000	2001	2002	2003	2004
1.	Pertanian	39,03	37,85	37,50	35,82	38,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,70	7,96	7,73	7,67	8,16
3.	Industri Pengolahan	11,54	11,78	11,46	11,46	13,39
4.	Listrik, Air dan Gas	0,97	1,11	1,21	1,19	1,25
5.	Bangunan	4,23	4,17	4,03	4,16	4,62
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,62	16,19	16,54	16,91	14,89
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,44	7,06	8,33	7,86	7,21
8.	Keuangan, Penyewaan dan Jasa Perusahaan	3,46	3,14	3,84	9,33	5,96
9.	Jasa-Jasa	11,01	10,74	10,82	10,73	11,16

Sumber : BPS Sul-Sel, (Indikator Ekonomi Sulawesi - Selatan)

Selain sektor pertanian, sektor yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 14,89 persen, disusul sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa sebesar 11,16 persen dari total pembentukan PDRB. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2004 adalah sektor listrik, air dan gas yakni hanya sebesar 1,25 persen.

Bila dicermati secara mendalam, maka tampak bahwa selama kurun waktu 2000-2004, telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Sulawesi Selatan. Dimana Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2000 yang sebesar 39,03 persen telah mengalami pergeseran menurun menjadi 38,17 persen pada tahun 2004. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat dengan semakin pesatnya laju pembangunan disuatu daerah, maka hal tersebut akan berimplikasi pada pergeseran perubahan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lahan non pertanian seperti perumahan, pasar, serta fasilitas publik lainnya. Tetapi yang perlu juga dicermati secara mendalam bahwa pergeseran pertumbuhan dari sektor pertanian ke sektor lainnya masih sangat lambat. Dimana penurunan pertumbuhan sektor pertanian dari tahun 2000 sampai dengan 2004 itu jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor perdagangan misalnya, yang mana pada tahun 2000 sebesar 14,62 persen kemudian naik menjadi 14,89 persen pada tahun 2004.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### i.1. Anggaran Belanja Pembangunan dan Realisasinya

Kebijakan anggaran belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena sesungguhnya pembiayaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, *human investment*, serta sektor lainnya adalah merupakan upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (*growth enhancing*) dari sisi kebijakan fiskal. Dimana diharapkan agar pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total out put (PDRB) yang dihasilkan.

Pada dasarnya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan anggaran pembangunan senantiasa mempertimbangkan skala prioritas pengalokasian anggaran yang terbatas berdasarkan fungsi anggaran yang diharapkan. Sehingga *multiplier effect* yang ditimbulkannya terhadap aktivitas perekonomian, secara keseluruhan masyarakat dapat ikut terlibat didalamnya dan dapat ikut serta merasakan hasil-hasilnya.

Untuk melihat perkembangan realisasi anggaran belanja pembangunan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1992 – 2002, maka hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini. Anggaran belanja pembangunan yang direalisasikan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu yang diamati dari tahun 1994/1995 – 2004 telah mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 1992/1993 realisasi anggaran belanja pembangunan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 68.109 (juta).

**Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan**

**Berdasarkan Fungsi Anggaran Tahun 1992 – 2002 (Juta)**

TAHUN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI :			TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN (%)
	ALOKASI	DISTRIBUSI	STABILISASI		
1992/1993	22,119.45	17,706.25	28,283.30	68,109.00	-
1993/1994	24,026.00	16,634.55	22,683.45	63,344.00	-7.00
1994/1995	28,737.00	17,562.00	38,367.00	84,666.00	33.66
1995/1996	40,053.00	13,631.00	35,674.00	89,358.00	5.54
1996/1997	45,239.00	16,849.00	37,443.00	99,531.00	11.38
1997/1998	62,493.00	22,330.00	44,302.00	129,125.00	29.73
1998/1999	61,909.88	20,527.45	36,691.04	119,128.37	-7.74
1999/2000	61,343.98	35,144.66	37,334.74	133,823.38	12.34
2000	63,698.49	58,595.12	38,857.11	161,150.72	20.42
2001	61,909.90	20,650.02	36,691.04	119,250.96	-26.00
2002	149,737.38	69,400.23	128,839.83	347,977.44	191.80

Sumber : BAPPEDA Sul-Sel Dan BPS Sul-Sel (Data Diolah)

Selanjutnya pada tahun 1993/1994 realisasi ini kemudian mengalami penurunan sebesar 7 % atau setara dengan Rp 63.344 (juta). Pada tahun 1994/1995 jumlah realisasi anggaran belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 84.666 (juta).

Untuk tahun 1995/1996 jumlah mengalami peningkatan menjadi Rp 89.358 (juta) atau mengalami peningkatan 5,54 % dibanding tahun sebelumnya dan selanjutnya pada tahun 1996/1997 anggaran belanja pembangunan yang terealisasi terus mengalami peningkatan hingga mencapai total Rp 99.531 (juta) atau naik 11,38 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1997/1998 total anggaran belanja pembangunan yang terealisasi terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana kenaikannya mencapai 29,73 % dari tahun sebelumnya dengan total anggaran sebesar Rp 129.125 (juta). Namun pada tahun 1998/1999 total realisasi anggaran belanja pembangunan mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai titik terendah yakni sebesar Rp 119.128,37 (juta) atau turun -7,74 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 1999/2000 realisasi anggaran belanja pemerintah propinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai pembangunan kembali mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp 133.823,38 (juta) atau naik 12,34 % dibanding total realisasi tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2000 realisasi anggaran belanja pembangunan propinsi Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan sebesar 20,42 % dari tahun sebelumnya dengan total realisasi mencapai Rp 161.150,72 (juta). Sedangkan pada tahun anggaran 2001 total realisasi belanja pembangunan kembali mengalami kontraksi penurunan sebesar -26,00 % atau setara dengan jumlah Rp

119.250,96 (juta). Sedang untuk tahun anggaran 2002 total realisasi anggaran belanja pembangunan kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni naik sebesar 191,80 % dari tahun 2001 atau setara dengan dengan nilai sebesar Rp 347.977,44 (juta).

Arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Selatan selama periode pembangunan jangka panjang (PJP) I lebih di fokuskan pada pembiayaan proyek yang mendukung dan menopang pembangunan penyediaan sarana dan prasarana fital yang mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap total out put (PDRB). Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut maka pemerintah propinsi kemudian menuangkannya dalam beberapa program seperti "Gerakan Peningkatan Komoditas Ekspor 2 Kali Lipat" (Grateks 2), "Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat" (Gerbang Emas) serta pemberdayaan potensi ekonomi masing-masing daerah melalui program "Bosowa Sipil". Guna menopang pencapaian program pembangunan tersebut, maka arah kebijakan alokasi anggaran pembangunan yang dilaksanakan senantiasa difokuskan pada pembiayaan sektor-sektor unggulan dalam rangka penyediaan infrastruktur pendukung bagi program tersebut.

## **5.2. Profil Produk Domestik Regional Bruto**

Perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) propinsi Sulawesi Selatan tahun 1994 - 2004 (atas harga konstan 1993) telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan antara tahun 1994 sampai 1995 yang telah mengalami pertumbuhan sebesar 8,12 %. Hal ini banyak ditopang oleh peningkatan kontribusi sektor pertanian, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk tahun 1996 kembali terjadi pertumbuhan yang positif dan signifikan sebesar 8,47 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ini



banyak didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan seperti produk-produk unggulan dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan serta sektor bangunan. Untuk melihat perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan 1993, maka hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut ini.

**Tabel 5.2.**

**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto  
Tahun 1994 – 2004 Atas Harga Konstan 1993 (Juta)**

TAHUN	P D R B	PERUBAHAN (%)
1994	8,088,147.10	-
1995	8,744,917.36	8.12
1996	9,485,863.15	8.47
1997	9,893,420.13	4.30
1998	9,366,229.18	-5.33
1999	9,631,072.65	2.83
2000	10,101,947.63	4.89
2001	10,615,491.44	5.08
2002	11,092,995.70	4.50
2003	11,690,525.15	5.39
2004	12,187,846.64	4.25
<b>RATA - RATA</b>		<b>4.25</b>

Sumber : BPS Sul-Sel, Indikator Ekonomi Sul-Sel (Data Diolah)

Pada tahun 1997 produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Selatan kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,30 % namun pertumbuhan ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh penurunan kontribusi beberapa sektor seperti sektor pertambangan dan galian serta sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan kontribusi yang sangat besar. Sedangkan untuk tahun 1998 perkembangan PDRB Sulawesi Selatan telah mengalami penurunan pertumbuhan negatif yang sangat tajam yakni mencapai level -5,33 %. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari puncak krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia pada waktu yang bersamaan. Namun kondisi ini pada satu sisi menimbulkan efek bagi sektor-sektor ekonomi yang banyak menggantungkan bahan bakunya terhadap barang impor serta sangat rentan terhadap pengaruh fluktuasi ekonomi global seperti sektor industri pengolahan, sektor bangunan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Namun pada sisi lain kondisi ini justru memberikan angin segar bagi sektor-sektor ekonomi yang bahan baku lokanya lebih besar serta memiliki orientasi pasar ekspor seperti sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Untuk tahun 1999 PDRB Sulawesi Selatan telah mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,83 % dibanding tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari telah membaiknya sektor-sektor ekonomi yang pada tahun sebelumnya justru mengalami pertumbuhan negatif. Perbaikan ini mencakup semua sektor-sektor ekonomi kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sedangkan sektor pertambangan dan galian serta sektor pertanian masih menjadi sektor penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada tahun



2000 kembali PDRB mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,89 %. Pertumbuhan ini semakin meningkat karena diakibatkan oleh semakin membaiknya semua sektor-sektor ekonomi yang telah porak-poranda pada puncak krisis tahun 1998, termasuk sudah pulihnya sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dimana kemudian masyarakat dan dunia usaha dapat lebih mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan dan modal usaha.

Pada tahun 2001 kembali PDRB Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,08 % dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini banyak didorong oleh semakin berhasilnya program Gerakan Peningkatan Komoditas Ekspor 2 Kali Lipat "Grateks 2" yang telah dicanangkan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil-hasil pertanian yang memiliki nilai jual ekspor yang tinggi. Serta upaya ini juga ditopang oleh semakin meningkatnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya guna membiayai sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk tahun 2002 perkembangan PDRB Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,50 %, namun pertumbuhan ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan tahun sebelumnya. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh penurunan kontribusi dari beberapa sektor-sektor ekonomi yang selama ini banyak menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan seperti sektor pertanian. Penurunan ini diakibatkan oleh telah bergesernya fungsi lahan pertanian menjadi perumahan serta fasilitas-fasilitas publik lainnya, sementara arah kebijakan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi lahan pertanian tidak ada. Disamping itu struktur ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2002 mulai mengalami pergeseran dari sektor

pertanian ke sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa lainnya.

Pada tahun 2003 PDRB Sulawesi Selatan kembali mengalami pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 5,39 %. Pencapaian pertumbuhan ini dominan didorong oleh semakin meningkatnya kontribusi sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Adapun sektor pertanian yang selama ini menjadi sektor ekonomi primadona Sulawesi Selatan walaupun mengalami pertumbuhan namun pencapaian ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi diatas. Sedangkan untuk tahun 2004 pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,25 %. Meskipun mencapai pertumbuhan positif, namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pencapaian ini masih lebih kecil. Hal ini banyak diakibatkan oleh semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air. Sementara program Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat "Gerbang Emas" yang dicanangkan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003 telah menunjukkan hasilnya. Dimana program ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Keberhasilan program ini dapat ditunjukkan melalui semakin meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bangunan.

### 5.3. Hasil Perhitungan Pengaruh Fungsi Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan

Untuk membuktikan hipotesa yang diajukan dalam penulisan ini, maka dilakukan perhitungan regresi dengan metode regresi linear berganda. Metode ini merupakan suatu analisa kuantitatif yang digunakan untuk menghitung koefisien regresi, hubungan variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) secara individual dan menyeluruh.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data realisasi anggaran belanja pembangunan berdasarkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi pemerintah propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan data time series yang dimulai sejak tahun 1992 – 2002.

Tabel 5.3.

Hasil Regresi Anggaran Pembangunan Fungsi Alokasi ( $Al_{t-2}$ ), Distribusi ( $Ds_{t-2}$ ) dan Stabilisasi ( $St_{t-2}$ ) Terhadap PDRB ( $Y_{pt}$ ) Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 1992 - 2002

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	B	r	t hitung	Sig
Konstanta ( $Y_{pt}$ )	8,5			21,023	0,000
Alokasi ( $Al_{t-2}$ )	8,6	2,160	0,665	2,356	0,051
Distribusi ( $Ds_{t-2}$ )	1,5	0,271	0,170	0,456	0,662
Stabilisasi ( $St_{t-2}$ )	-7,6	-1,664	-0,642	-2,213	0,062

Sumber : Hasil Pehitungan Regresi (Data Terlampir)

### 5.3.1. Koefisien Regresi

Setelah dilakukan perhitungan regresi linear berganda, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y_{pt} = 8,5 + 8,6 Al_{t-2} + 1,5 Ds_{t-2} - 7,6 St_{t-2}$$

(21,023) (2,356) (0,456) (-2,213)\*

$$R = 0,889 \quad F \text{ test} = 8,798$$
$$R^2 = 0,790$$

\* Nilai t-test

Dari hasil persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi Alokasi (Al) anggaran pembangunan, memberikan pengaruh positif nyata terhadap perubahan PDRB. Sedangkan secara parsial hubungan keeratan antara fungsi alokasi terhadap PDRB sebesar 66,5 %. Sementara hasil perhitungan regresi menunjukkan koefisien sebesar 8,6. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan peningkatan sebesar 8,6 satuan realisasi fungsi alokasi anggaran pembangunan pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya (t-2), maka hal ini akan memberikan dampak padai peningkatan PDRB sebesar 1 satuan pada tahun tersebut (t) dan sebaliknya.
- Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi Distribusi (Ds) anggaran pembangunan, memberikan pengaruh positif nyata terhadap perubahan PDRB. Sedangkan secara parsial hubungan keeratan antara fungsi distribusi terhadap PDRB sebesar 17 %. Sementara hasil perhitungan regresi menunjukkan koefisien sebesar 1,5. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan peningkatan sebesar

1,5 satuan realisasi fungsi distribusi anggaran pembangunan pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya ( $t-2$ ), maka hal ini akan memberikan dampak pada kenaikan 1 satuan pada PDRB tahun tersebut ( $t$ ) dan sebaliknya.

- Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi Stabilisasi ( $St$ ) anggaran pembangunan memberikan pengaruh negatif terhadap perubahan PDRB. Sedangkan secara parsial hubungan keeratan antara fungsi stabilisasi terhadap PDRB sebesar 64,2 %. Sementara hasil perhitungan regresi menunjukkan koefisien sebesar -7,6. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan penurunan sebesar 7,6 satuan realisasi fungsi stabilisasi anggaran pembangunan pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya, maka hal ini akan memberikan dampak pada kenaikan 1 satuan pada PDRB tahun tersebut ( $t$ ) dan sebaliknya.

### 5.3.2. Uji Signifikansi Pengaruh (Uji-t)

Untuk menguji signifikansi dari koefisien regresi, maka harus diuji dengan uji-t rasio, dimana hal ini berarti membandingkan antara uji t-hitung dengan uji t-tabel. Dimana apabila uji t-hitung  $\geq$  t-tabel berarti diasumsikan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, tentu akan berpengaruh signifikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diteliti, ternyata satu variabel yang berpengaruh tidak signifikan, hal ini terbukti dari t-hitung  $<$  t-tabel. Hasil regresi menunjukkan koefisien uji t, variabel fungsi Distribusi ( $Ds$ ) anggaran pembangunan =  $0,456 < 1,895$ . Hasil uji t variabel fungsi Alokasi ( $Al$ ) anggaran pembangunan =  $2,356 > 1,895$ , berarti fungsi Alokasi signifikan berpengaruh positif sedangkan koefisien uji t variabel fungsi Stabilisasi ( $St$ ) anggaran pembangunan =  $-2,213 > 1,895$  berarti variabel fungsi Stabilisasi memiliki pengaruh

signifikan negatif terhadap variabel terikat (PDRB), dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ .

Dari hasil pengujian tersebut diatas, menunjukkan bahwa perubahan PDRB propinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu penelitian 1994 - 2004, adalah sangat dipengaruhi oleh variabel fungsi alokasi dan stabilisasi anggaran pembangunan pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya (t-2).

### 5.3.3. Uji Koefisien Korelasi (R)

*Koefisien Korelasi (R)* : Untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara variabel bebas (fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi) dan variabel terikat (PDRB) secara bersama-sama, maka hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R). Nilai R terletak antara 0 dan 1 atau  $0 \leq R \leq 1$ .

Koefisien korelasi sebesar 0,889, hal ini berarti bahwa korelasi antara fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran pembangunan terhadap perubahan PDRB adalah memiliki hubungan yang kuat dan searah.

### 5.3.4. Uji Determinasi ( $R^2$ )

*Koefisien Determinasi ( $R^2$ )* : Untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan variabel terikat ditentukan oleh variasi perubahan variabel bebas secara bersama-sama, dimana nilai  $R^2$  terletak antara 0 dan 1 atau  $0 \leq R^2 \leq 1$ .

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,790, ini berarti bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran pembangunan memberikan kontribusi sebesar 79 persen terhadap perubahan PDRB, sedangkan sisanya 21 persen ditentukan oleh faktor-faktor lain selain dari variabel bebas.



### 5.3.5. Uji F

*Analisis Variance (Uji F)* : Untuk menguji keberartian atau signifikansi dari pengaruh variabel terikat secara bersama-sama terhadap variabel bebas.

Dari hasil penelitian diperoleh F-hitung sebesar 8,798, sedangkan F-tabel sebesar 4,35, yang berarti bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan dengan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat adalah signifikan.

### 5.4. Analisis Hasil Perhitungan

Koefisien regresi fungsi Alokasi (A1) yang menunjukkan pengaruh positif terhadap PDRB, hal ini menjelaskan bahwa untuk mendorong PDRB Sulawesi Selatan maka diperlukan adanya peningkatan fungsi alokasi anggaran pembangunan. Hal ini mengingat bahwa dengan semakin meningkatnya ketersediaan sarana infrastruktur pendukung dibidang pertanian, perhubungan, irigasi, industri dan sebagainya, maka hal tersebut secara simultan akan berimplikasi langsung bagi peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat seperti produksi, distribusi dan konsumsi yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan PDRB.

Koefisien regresi fungsi Distribusi (Ds) menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB, hal tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pembangunan ke fungsi distribusi yang meliputi pendidikan, kesehatan, kependudukan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi peningkatan PDRB pada tahun itu juga atau dalam kurun waktu yang singkat. Namun fungsi anggaran ini lebih banyak bersifat *human investment*, yang hasilnya baru dapat dilihat pada masa yang akan datang.

Koefisien regresi fungsi Stabilisasi (St) menunjukkan pengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi fungsi stabilisasi anggaran pembangunan yang meliputi bidang pertahanan dan keamanan, agama, hukum, aparat pemerintah dan sebagainya. Hal ini akan sangat berimplikasi langsung dalam mendorong peningkatan PDRB Sulawesi Selatan. Mengingat sektor-sektor yang dibiayai oleh anggaran pembangunan fungsi stabilisasi adalah dominan merupakan sektor pendukung bagi upaya untuk meningkatkan PDRB. Dimana dengan terciptanya sistem administrasi dan pelayanan pemerintahan yang baik serta kondisi masyarakat semakin aman, damai dan tentram serta taat dan patuh terhadap hukum, maka hal ini secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan PDRB.

## BAB VI

### PENUTUP

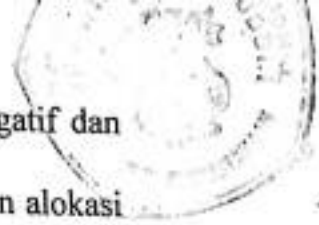
#### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial hubungan variabel bebas yakni anggaran pembangunan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi terhadap variabel terikat yaitu PDRB menunjukkan bahwa, dari tiga variabel bebas yang diteliti ternyata satu variabel yang memiliki pengaruh tidak signifikan yakni fungsi distribusi (Ds). Sedangkan variabel anggaran pembangunan fungsi alokasi (Al) dan Stabilisasi (St) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Secara simultan hubungan variabel bebas anggaran pembangunan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB propinsi Sulawesi Selatan. Namun secara parsial variabel fungsi alokasi dan stabilisasi merupakan fungsi anggaran pembangunan yang paling signifikan dalam membentuk PDRB Sulawesi Selatan.

#### 6.2. Saran

1. Oleh karena anggaran pembangunan fungsi alokasi dan stabilisasi, merupakan fungsi anggaran pembangunan yang memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap PDRB propinsi Sulawesi Selatan. Maka sebaiknya Pemerintah dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran pembangunan agar senantiasa mempertimbangkan peningkatan pembiayaan sektor-sektor pembangunan yang ada dalam fungsi alokasi dan stabilisasi.



2. Meskipun anggaran pembangunan fungsi distribusi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan PDRB propinsi Sulawesi Selatan. Maka peningkatan alokasi anggaran pembangunan untuk pembiayaan sektor-sektor pembangunan yang ada dalam kedua fungsi tersebut tetap diperlukan. Hal ini mengingat sektor-sektor tersebut merupakan sektor pendukung dan investasi jangka panjang bagi upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan PDRB propinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Nurjaman dkk. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta : Intermedia.
- Arsyad, Loncolin. 1999. *Pengantar perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Azis, Iwan J. 1993. *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta : LP FEUI.
- Budiono. 1995. *Teori Perkembangan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE.
- B P S. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 1994-2004*. Makassar : B P S.
- , 1999. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 1999*. Makassar : B P S.
- , 2004. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2000 – 2004*. Makassar : B P S.
- Damodar, Gujarati. 1993. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Departemen Keuangan RI. 2006. *Sosialisasi Kebijakan Fiskal*. Makassar.
- Djoyohadikusumo, Soemitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Keuangan Negara*. 2006. Bandung : Fokus Media.
- Helmi, Abu. 2003. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB di Kalimantan Timur*. Makassar : LEPHAS.
- Jhingan, LM. 1998. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan* . Jakarta : Rajawali Press.
- , 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta : UI Press.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Informasi Keuangan Negara*. Jakarta : Gramedia Press.
- Mustopadijaya, AR. 1997. *Sistem Dan Prosedur Penyusunan APBND, Modul Pada Diklat TMPP – D Angkatan XV*. Ujung Pandang.
- Richardson, W.H. 2001. *Dasar – Dasar Ilmu Regional*. Jakarta : LP FEUI.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sukirno, Sadono. 1985. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta : LP FEUI.

Suparmoko, N. 1987. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

----- .1996. *Azas – Azas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE.

Supranto, J. 1995. *Ekonometrika*. Jakarta : LPFE UI.

Syafruddin, Akhmad. 2001. *Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Perkembangan Ekonomi Kota Waringin Barat*. Makassar : LEPHAS.

Tumbunan, Tulus. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

*Undang – Undang Otonomi Daerah 2004*. 2005. Bandung : Citra Umburan.